

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi yang masyarakatnya tersebar luas di berbagai pulau. Posisi geografis negara yang unik membuat usaha mengurangi angka kemiskinan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Salah satu cara yang dilakukan agar mengurangi kemiskinan yaitu dengan harus berdayanya masyarakat Indonesia sendiri, Menurut Usman, dalam Mulyono (2012) menyebutkan bahwa “Pemberdayaan adalah suatu proses pembelajaran masyarakat untuk mengembangkan seluruh potensi agar dapat berperan serta dalam pembangunan”. Sedangkan dalam Anwas (2014:50) Pranarka dan Muljanto menyebutkan bahwa

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, Negara, dan tata nilai dalam kerangka proses akulturasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud diberbagai kehidupan politik, hukum, pendidikan, dan sektor lain sebagainya, pemberdayaan memiliki makna menghidupkan kembali tatanan nilai, kehidupan, dan kearifan lokal dalam membangun jati dirinya sebagai individu dan masyarakat.

Sejalan dengan pemberdayaan, pemberdayaan perempuan sangat diperlukan bercermin dari negara tetangga yang telah menjadi Macan Asia, Jepang dan Korea bisa maju karena sumber daya manusianya di tampung dan diberdayakan, para perempuan di negeri itu bisa meningkatkan kemampuan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Karena perempuan sendiri memiliki peran yang beragam dari mulai mendidik anak, mengurus rumah, sampai pada berkarir diluar rumah. Dunia kerja yang selama ini dianggap milik laki-

laki, sekarang mulai dimasuki oleh penghuni baru yaitu perempuan. perempuan harus berpendidikan, perempuan harus mandiri, maka pemberdayaan perempuan begitu sangat penting dalam suatu pembangunan bangsa.

Berbeda dengan di Indonesia apalagi daerah yang bukan perkotaan para perempuan cenderung memiliki akses yang rendah terhadap pendidikan, padahal dapat kita ketahui bahwasannya tingkat pengembalian dari investasi pendidikan kaum wanita lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengembalian dari investasi pendidikan kaum pria, hal ini menunjukkan bahwa kaum wanita dapat memberikan produktivitas kerja yang lebih tinggi, untuk jangka panjang, wanita tersebut dapat menjamin kualitas intelegensi anak-anaknya sehingga berguna untuk masa depan. namun yang terjadi dilapangan malah sebaliknya yang menyebabkan jika perempuan bekerja maka penghasilannyapun akan lebih rendah daripada laki-laki karena rendahnya pendidikan kaum wanita, serta tak jarang perempuan mendapatkan diskriminasi dan pengecualian dalam setiap proses pengambilan keputusan, baik di keluarga maupun masyarakat. akhirnya keluarga yang terpaksa harus dipimpin oleh seorang perempuan pada umumnya merupakan keluarga yang paling miskin dan rentan.

Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, memperkirakan terdapat 65 juta keluarga di Indonesia, di mana dari keluarga-keluarga tersebut, 14% (9 juta)-nya dikepalai oleh perempuan. Padahal data SUSENAS tahun 2007 menunjukkan jumlah perempuan di Indonesia yang (terpaksa) menjadi kepala

keluarga, adalah mencapai 13,60 % dari populasi keluarga. Oleh sebab itu pemerintah mengadakan suatu program yang disebut dengan PEKKA Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Dalam program ini menempatkan para perempuan kepala keluarga lebih pada kedudukan, dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga. Selain itu, program ini diharapkan mampu membuat perubahan sosial dengan mengangkat martabat janda dalam masyarakat yang selama ini terlanjur mempunyai *stereotype* negatif.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program pemberdayaan bagi masyarakatnya, salah satu program yang dilaksanakan yaitu pemberdayaan perempuan terkhusus perempuan kepala keluarga atau sering disebut PEKKA. dengan sasaran dari programnya yaitu PEKKA murni dan PEKKA tidak murni.

PEKKA murni diantaranya para perempuan yang dicerai oleh suaminya, suami yang pergi dari rumah tanpa kejelasan dan tidak kembali, istri yang ditinggal mati oleh suaminya, istri yang dimadu, perempuan yang sudah lewat umur menikah tetapi belum menikah, istri yang mempunyai suami cacat sehingga tanggungjawab mencari nafkah dilimpahkan kepada istri, dan anak perempuan yang menghidupi keluarganya, sedangkan untuk PEKKA tidak murni itu sendiri yaitu para istri yang masih memiliki suami dan bekerja namun kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga istripun ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Program ini digagas agar perempuan kepala keluarga dapat berdaya, mandiri, dapat berkontribusi dalam rangka ikut membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan bermartabat, selain itu dari program inipun bertujuan membangun ekonomi yang mandiri bagi perempuan kepala keluarga. Menarik untuk diteliti bagaimana proses “Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Pelatihan Berwirausaha (Studi pada Kelompok Zahra Prima di Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Menurut Haniy dalam tulisannya tentang Ketimpangan Gender di Indonesia “Terjadi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa sektor kehidupan diantaranya masalah pendidikan, perekonomian, dan politik”.
2. Duwiningsing (2016) Terdapat fenomena di pedesaan bahwa banyak perempuan yang telah menikah kurang berkembang dari pendidikan dan keterampilannya.
3. Dari data SUSENAS tahun 2007 menunjukkan jumlah perempuan di Indonesia yang (terpaksa) menjadi kepala keluarga, adalah mencapai 13,60 % dari populasi keluarga.
4. Adanya *mindset* kurang baik dari masyarakat kepada perempuan kepala keluarga.

5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilapangan masih banyak yang sebatas menjalankan program.
6. Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program pemberdayaan bagi masyarakatnya, salah satu programnya yaitu pemberdayaan perempuan terkhusus perempuan kepala keluarga (PEKKA)
7. Program yang dijalankan berupa pendidikan sepanjang hayat, penguatan ekonomi, pemberdayaan hukum, penguatan politik, media rakyat, hak kesehatan sepanjang masa.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka dirumuskanlah masalah yang akan diteliti “Bagaimana Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Pelatihan Berwirausaha di Kelompok Zahra Prima Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya?”.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui “Bagaimana Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Pelatihan Berwirausaha di Kelompok Zahra Prima Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya”.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah atau variabel di dalam skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu ”Pemberdayaan Perempuan

Melalui Pelatihan Berwirausaha (Studi Pada Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Kelompok Zahra Prima Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya) maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah:

1. Pemberdayaan Perempuan

Djohani (2003) dalam Anwas, (2014:49) “Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang berkuasa sehingga terjadi keseimbangan”. Dapat diambil pengertian secara makna bahwasannya pemberdayaan perempuan adalah suatu usaha yang sistematis dan terencana untuk mencapai keadilan dan kesetaraan hak di masyarakat bagi perempuan, meningkatkan status, posisi, dan kondisi bagi perempuan agar dapat mencapai kemajuan, meningkatkan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan, meningkatkan kualitas kemandirian dalam berorganisasi, dan tentunya meningkatkan kemandirian dalam bidang ekonomi untuk mencapai ekonomi yang mandiri dan produktif.

2. Perempuan Kepala Keluarga

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan di Indonesia, kepala keluarga adalah suami atau laki-laki. Dapat diambil definisi dari perempuan kepala keluarga adalah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, mempunyai peran dan melaksanakan tanggungjawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, dan pengambil keputusan dalam keluarga. Mencakup

perempuan yang ditinggal/dicerai hidup, perempuan yang suaminya meninggal dunia, perempuan yang membujang/tidak menikah, perempuan bersuami tetapi oleh karena suatu hal suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, perempuan bersuami tetapi tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin karena suaminya bepergian lebih dari satu tahun.

3. Pelatihan Berwirausaha

Sutarto (2012:2) Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menggambarkan suatu proses memahami, mendalami, menata ulang sikap, dan mempraktekan bidang latihan tertentu, sehingga dapat menyangkut aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dengan tekanan pada penguasaan kompetensi yang telah dimiliki. Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik definisi dari pelatihan berwirausaha adalah proses atau kegiatan pengajaran berupa memahami memulai sebuah usaha yang layak dengan memanfaatkan peluang yang ada pada saat tertentu dan daerah tertentu, dari mampu merencanakan, menciptakan, dan melaksanakan usaha yang di dalamnya ada inovasi, kreasi, dan motivasi kepada peserta agar dapat meningkatkan prestasinya dalam melakukan studi, mempersiapkan proposal rencana usaha.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Menjadi bahan masukan pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat.

- b. Untuk menambah keilmuan Pendidikan Masyarakat serta memperluas wawasan yang berkaitan dengan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).
- c. Dijadikan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang sama, sehingga hasilnya dapat lebih luas dan mendalam.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain yaitu:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi bekal pengetahuan dan pengalaman nyata bagi peneliti sehingga nantinya dapat memberikan pemahaman dan kontribusinya terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

b. Bagi Perempuan Kepala Keluarga

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai pentingnya perempuan sebagai kepala keluarga itu harus mandiri dan berdaya guna meningkatkan taraf hidup di masyarakat.

c. Bagi Pendamping Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan tentang keilmuan pemberdayaan masyarakat, selain itu menjadi bahan evaluasi sejauh mana keberhasilan program PEKKA yang di dampingi dari proses awal samapai akhir.

d. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan referensi atau bacaan yang dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang studi kajian pemberdayaan masyarakat dilapangan.

e. Bagi Peneliti Lainnya

Dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang mampu memberikan informasi pengetahuan dan pemahaman yang lebih tentang program pemberdayaan perempuan kepala keluarga, selain itu juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian skripsi ini. ditulis dengan struktur berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, dan manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian.

Bab III Prosedur Penelitian

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian, fokus penelitian, partisipan penelitian, waktu dan tempat penelitian, langkah-langkah penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat tentang uraian laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil peneliian yakni deskripsi dari interprestasi data-data yang diperoleh.

Bab V Penutup

Berisi simpulan dan saran.